



# Protes Warga vs PSN di Rempang

Rumah Belajar ICW, 14 September 2023

Zakki Amali, Manajer Riset Trend Asia

# Regulasi

- 2016: Muncul Perpres PSN
- 2020: Perpres PSN direvisi. Delegasi PSN ke Kemenko Ekon dan disetujui Presiden
- 2021: Rezim UU Cipta Kerja. PSN berubah dari Perpres ke Permenko Perekonomian

## Jumlah Proyek PSN

- 226-->Perpres 3/2016
- 248-->Perpres 58/2017
- 227-->Perpres 56/2018
- 211-->Perpres 109/2020
- 218-->Permenko 7/2021
- 212-->Permenko 9/2022
- 222-->Permenko 21/2022
- 224-->Permenko 7/2023

## Penghapusan Status PSN

- 2017: 15
- 2018: 14
- 2022: 8 (Permenko 9/2022)
- 2023: Gasifikasi PT KPC Kaltim

## Beberapa Kriteria PSN

Dasar PSN antara lain:

- Sesuai RPJMN & RTRW

Kriteria tambahan antara lain:

- Konstruksi selesai sebelum kuartal III 2024
- Investasi di atas Rp 500 miliar

## Hambatan PSN (KPPIP)

- Lahan 39%
- Konstruksi 24%
- Perencanaan & Penyiapan 15%
- Pendanaan 16%
- Perizinan 6%



# Pasal-Pasal PSN Bermasalah

## UU 6 Tahun 2023 tentang Perppu Cipta Kerja

- BAB II Pasal 20 Ayat 5 huruf d, Pasal 23 Ayat 5 huruf d & Pasal 26 Ayat 6 Huruf d: PSN dapat meninjau ulang Rencana Tata Ruang Wilayah di level nasional, provinsi & kabupaten lebih dari 1x dalam 5 tahun jika terjadi **perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis**.
- BAB X Pasal 173 Ayat 2: pengadaan tanah dapat dilakukan oleh **badan usaha** jika pemerintah belum dapat melakukan.

## Dampak Pasal-Pasal PSN di UU Cipta Kerja

- Terjadi **pemaksaan & represifitas** kepada warga karena pengadaan tanah bersifat wajib bagi warga.
- Terjadi **conflict of interest** (COI) pengelolaan PSN: Studi kasus hilirisasi nikel di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah. Pemegang saham terafiliasi dengan pejabat tinggi negara yang punya kewenangan meregulasi kebijakan PSN.

# Rempang Sebagai Ekosistem



## Kronologi Kebijakan PSN

- 2019: Rapat Pengembangan Wilayah Industri Mengenai Pulau Rempang, Kep. Riau di Kemenko Marves
- 2023-April: Program Pengembangan Kawasan Rempang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB PB) Batam oleh Menko Perekonomian
- 2023-Mei: PP 26/2023 izin penambangan pasir laut. Salah satunya berguna untuk reklamasi Pulau Rempang.
- 2023-28 Juli: Xinyi Glass Holdings Ltd komitmen \$11,6 miliar bangun pabrik panel surya di Rempang
- 2023-28 Agustus: Menko Perekonomian atas Persetujuan Presiden memasukkan Pulau Rempang ke dalam PSN.

## Rempang & Koneksi Isu

- Terhubung dengan rencana pembangunan PLTS di Kota Batam
- Terhubung dengan rencana ekspor listrik ke Singapura
- Terhubung dengan penambangan pasir laut
- Terhubung dengan penambangan pasir kuarsa/silika di Bangka Belitung serta potensi rencana pembangunan smelter & PLTU baru di Rempang
- Terhubung dengan utang proyek infrastruktur



#SaveRempang

Terima Kasih